



PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR DENGAN NEGARA

Fajar Ardiansah Wahyu, Abdul Muiz Nuroni

Institut Daarul Qur'an, Indonesia

Email: fajarardiansah310797@gmail.com, Abdulmuiznuroni@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Newmont Mining Corporation, sengketa, penyelesaian konflik, Indonesia, pertambangan

Latar Belakang: Penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 menjadi perhatian utama dalam hubungan bilateral antara kedua pihak. Sengketa ini timbul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut dan pemerintah Indonesia terkait dengan kegiatan pertambangan emas di Indonesia.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik sengketa tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya.

Metode: Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, termasuk dokumen-dokumen hukum, laporan media, dan laporan terkait.

Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 melibatkan serangkaian negosiasi antara kedua pihak yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik ini antara lain kepentingan politik dan ekonomi, tekanan masyarakat dan lingkungan, serta peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk melakukan restrukturisasi kontrak pertambangan dan meningkatkan partisipasi negara dalam kegiatan pertambangan.

Kesimpulan: Kesimpulannya, penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 merupakan hasil dari serangkaian negosiasi yang melibatkan berbagai faktor politik, ekonomi, dan hukum. Penyelesaian ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola konflik sengketa dengan perusahaan asing di sektor pertambangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan sengketa serupa di masa depan.

Keywords:

Newmont Mining Corporation, dispute, conflict resolution, Indonesia, mining

ABSTRACT

Background: The resolution of the dispute conflict between Newmont Mining Corporation and Indonesia in 2014 became a major concern in bilateral relations between the two parties. This dispute arose due to differences in views and interests between the mining company from the United States and the Indonesian government related to gold mining activities in Indonesia.

Purpose: *This study aims to analyze the conflict resolution of such disputes and identify the factors that influence the outcome.*

Method: *The method used by the authors in this study is qualitative analysis by collecting and analyzing secondary data, including legal documents, media reports, and related reports.*

Results: *The results of the analysis show that the settlement of the dispute conflict between Newmont Mining Corporation and Indonesia in 2014 involved a series of negotiations between the two parties initiated by the Indonesian government. Factors affecting the resolution of this conflict include political and economic interests, community and environmental pressures, and applicable legal regulations. The Indonesian government is taking strategic steps to resolve this conflict, including restructuring mining contracts and increasing state participation in mining activities.*

Conclusion: *In conclusion, the dispute conflict resolution between Newmont Mining Corporation and Indonesia in 2014 was the result of a series of negotiations involving various political, economic, and legal factors. This settlement provides important lessons for Indonesia in managing conflict disputes with foreign companies in the mining sector. By understanding the factors affecting conflict resolution, governments can take effective steps in resolving similar disputes in the future.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, Indonesia menjadi sorotan internasional akibat konflik sengketa yang terjadi di Negara Indonesia antara perusahaan tambang yang berasal dari Amerika Serikat, Newmont Mining Corporation. Ini adalah salah satu sengketa dari banyak permasalahan yang muncul dalam industri pertambangan di Indonesia, yang sering kali melibatkan kepentingan berbagai pihak yang berbeda. Konflik ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemerintah, perusahaan tambang asing, dan masyarakat di negara yang wilayahnya mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah seperti Indonesia (Anshori, Kriyantono, & Wulandari, 2017).

Newmont Mining Corporation adalah salah satu perusahaan tambang ternama di dunia ini, telah beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun (Amoako, Lord, & Dixon, 2017). Perusahaan ini terlibat dalam kegiatan pertambangan emas di Papua, yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan sangat berharga. Namun, perjalanan Newmont di Indonesia tidaklah selalu mulus. Konflik muncul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara Newmont dan pemerintah Indonesia terkait dengan berbagai aspek kegiatan pertambangan, termasuk masalah lingkungan, ekonomi, dan kebijakan pajak.

Sengketa ini menjadi pusat perhatian publik karena dampaknya yang luas dan kompleks (Widowaty & Fitriyanti, 2014). Konflik antara Newmont dan pemerintah Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum dan bisnis, tetapi juga memiliki implikasi politik dan sosial yang signifikan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional, sementara Newmont mencoba untuk mempertahankan operasionalnya dan melindungi keuntungan bisnisnya.

Penyelesaian konflik sengketa ini menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian investasi di Indonesia. Upaya penyelesaian dilakukan melalui serangkaian negosiasi antara kedua belah pihak, dengan peran aktif dari pemerintah Indonesia sebagai mediator dan pengatur (Usboko, 2016). Pemerintah berusaha menemukan titik tengah yang

dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak, sekaligus memastikan keberlanjutan operasional perusahaan asing dan melindungi kepentingan nasional.

Salah satu faktor penting dalam penyelesaian konflik ini adalah kepentingan politik dan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertambangan di Indonesia. Pertambangan merupakan salah satu bidang yang paling tinggi dalam memajukan perekonomian Indonesia, karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil dalam penyelesaian konflik ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di negara ini (Soetarto, 2016).

Selain itu, tekanan dari masyarakat dan kelompok lingkungan juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik ini. Masyarakat dan kelompok lingkungan memiliki kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Tekanan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam kebijakan penyelesaian konflik, dengan tujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain faktor politik, ekonomi, dan tekanan masyarakat, peraturan hukum juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik ini (Djumati, Lengkong, & Tulung, 2020). Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan pertambangan melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selama penyelesaian konflik, pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, serta memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan nasional.

Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, termasuk dokumen-dokumen hukum, laporan media, dan laporan terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penyelesaian konflik dan mendapatkan pelajaran yang dapat diambil untuk mengelola konflik serupa di masa depan (Ahmad Redi, 2022).

Dengan memahami kompleksitas dan faktor-faktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika sengketa antara perusahaan tambang asing dan pemerintah di negara-negara dengan sumber daya alam melimpah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan oleh peneliti bisa memberikan pertimbangan bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola konflik sengketa di sektor pertambangan, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, lingkungan, dan kepentingan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 dapat dilihat melalui tinjauan studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, artikel, dan laporan yang relevan dengan kasus tersebut.

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memahami latar belakang konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak, serta hasil penyelesaian yang dicapai (Aminati & Purwoko, 2013). Melalui tinjauan literatur, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang dinamika konflik tersebut, termasuk langkah-langkah yang diambil dalam proses penyelesaian.

Selain itu, studi pustaka juga memberikan akses kepada peneliti untuk mempelajari peraturan hukum yang relevan dengan kasus ini. Peneliti dapat mengkaji undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang terkait dengan pertambangan di Indonesia. Dalam hal ini, studi pustaka dapat membantu peneliti dalam memahami kerangka hukum yang mengatur kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap konflik sengketa.

Selain itu, studi pustaka juga dapat memberikan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik ini. Peneliti dapat mempelajari laporan media, laporan LSM, atau penelitian akademik yang melibatkan perspektif masyarakat sipil, kelompok lingkungan, dan aktor-aktor lain yang terkait dengan konflik ini. Dengan memperoleh berbagai sudut pandang ini, peneliti dapat menggambarkan secara lebih lengkap dinamika konflik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Melalui metode studi pustaka, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap kasus konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa peneliti dapat memanfaatkan sumber daya literatur yang telah ada untuk memahami konflik tersebut secara holistik dan menganalisis peran berbagai faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya.

Namun, perlu diingat bahwa metode studi pustaka memiliki keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap informasi terbaru dan kesulitan untuk memverifikasi keabsahan dan keakuratan data yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memperhatikan sumber-sumber yang terpercaya dan membandingkan hasil dari banyaknya sumber-sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang penyelesaian konflik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 melibatkan berbagai faktor, termasuk aspek hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang di Negara Indonesia. UU tersebut memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi penyelesaian konflik, serta mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak yang terlibat (Salim, 2022). Salah satu Undang-Undang yang relevan dalam konteks penyelesaian konflik pertambangan adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini mengatur segala aspek terkait pertambangan, termasuk perizinan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Dalam hal konflik sengketa, UU ini memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan, mediasi, atau arbitrase.

Dalam penyelesaian konflik antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia, peranan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sangat penting. Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja untuk mengatur hubungan antara perusahaan tambang asing dan pemerintah Indonesia, Salah satu perspektif yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah perizinan. Undang-Undang ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang dalam memperoleh izin operasi di Indonesia (Agassi, Hendrawan, & Mubarak, 2023). Perusahaan tambang, termasuk Newmont Mining Corporation, harus mematuhi persyaratan tersebut agar dapat melaksanakan kegiatan pertambangan dengan sah.

Selain itu, UU tersebut juga mengatur tanggung jawab perusahaan tambang terhadap lingkungan. Pertambangan yang dilakukan oleh Newmont Mining Corporation harus mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perusahaan wajib melaksanakan upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan yang terdampak akibat kegiatan pertambangan. Dalam penyelesaian konflik sengketa, aspek lingkungan menjadi salah satu perhatian penting yang diatur dalam UU tersebut.

Selain UU Nomor 4 Tahun 2009, ada juga Undang-Undang lain yang relevan dalam konteks penyelesaian konflik pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dipatuhi oleh perusahaan tambang. Dalam penyelesaian konflik sengketa, aspek lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang ini menjadi pertimbangan penting dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan (Raharja & Harjiyatni, 2014).

Selain dari sisi peraturan, penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia juga melibatkan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya seperti mediasi atau negosiasi.

Dalam penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia, mekanisme mediasi atau negosiasi menjadi pilihan yang digunakan untuk mencapai kesepakatan. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak (Winarta, 2022). Melalui mekanisme ini, pemerintah Indonesia berperan sebagai mediator antara Newmont Mining Corporation dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Selain Undang-Undang yang secara langsung terkait dengan penyelesaian konflik sengketa, juga terdapat regulasi-regulasi yang mengatur pajak dan penerimaan negara lainnya yang relevan dalam konteks penyelesaian konflik ini. Penyelesaian konflik sengketa ini juga dapat melibatkan kajian terhadap kebijakan pajak dan mekanisme penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang terkait.

Secara keseluruhan, penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 melibatkan berbagai aspek yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta regulasi-regulasi terkait lainnya, memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi penyelesaian konflik ini (Pemerintah, 2009). Dalam penyelesaian konflik ini, aspek perizinan, lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta aspek pajak dan penerimaan negara menjadi pertimbangan penting yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dengan mengikuti landasan hukum yang ada, penyelesaian

konflik dapat dicapai dengan menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak yang terlibat, serta memperhatikan kepentingan nasional dan keberlanjutan operasional perusahaan tambang asing di Indonesia.

Sebagai tambahan, dalam penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014, terdapat pula aspek-aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja yang mengatur investasi asing di Indonesia, termasuk investasi dalam sektor pertambangan.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal menetapkan hak, perlindungan, dan kewajiban bagi investor asing, termasuk dalam hal penyelesaian konflik. Salah satu mekanisme yang diatur adalah penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Perusahaan Penanaman Modal (BPS-SP). BPS-SP merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang melibatkan investor asing dan pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme ini, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil dan objektif dengan melibatkan pihak yang independen dan ahli di bidang hukum.

Selain itu, penting juga untuk mencermati aspek hukum internasional yang dapat mempengaruhi penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia. Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang relevan, termasuk dalam hal perlindungan investasi asing. Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti perlakuan yang adil dan setara terhadap investor asing, juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik ini.

Dalam konteks penyelesaian konflik sengketa, perlu dicatat bahwa Undang-Undang di Indonesia merupakan instrumen yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyelesaian sengketa. Namun, dalam prakteknya, penyelesaian konflik bukan hanya aspek hukum yang dilihat, tetapi juga melibatkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial. Proses penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya, serta mengintegrasikan berbagai aspek yang melibatkan kepentingan nasional, lingkungan, dan keadilan.

Dalam kasus konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014, penyelesaian yang akhirnya dicapai dapat dipandang sebagai hasil dari kompromi antara kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Penyelesaian konflik ini juga memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia dalam mengatur sektor pertambangan, termasuk perluasan peraturan dan kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Undang-Undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, serta perjanjian internasional yang relevan, memberikan kerangka kerja dan landasan hukum penting dalam penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia. Namun, penyelesaian konflik juga harus

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang melibatkan kepentingan nasional, lingkungan, dan keadilan demi mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Abib, 2018).

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik sengketa antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia pada tahun 2014 merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, serta perjanjian internasional yang relevan menjadi landasan hukum yang penting dalam penyelesaian konflik ini.

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka kerja untuk mengatur hubungan antara perusahaan tambang asing seperti Newmont Mining Corporation dan pemerintah Indonesia. Perizinan, persyaratan lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan adalah beberapa aspek yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi penting dalam penyelesaian konflik ini, mengatur prinsip-prinsip perlindungan dan pemulihan lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan tambang.

Selain itu, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa digunakan dalam penyelesaian konflik ini. Melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan. Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga memberikan perlindungan dan kewajiban bagi investor asing, termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan pemerintah Indonesia.

Dalam penyelesaian konflik ini, perlu diperhatikan pula aspek-aspek lain yang melibatkan faktor politik, ekonomi, dan sosial. Penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, penyelesaian konflik juga harus memperhatikan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang.

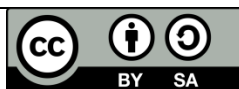
Dalam kasus penyelesaian konflik antara Newmont Mining Corporation dan Indonesia, terdapat kompromi antara kedua belah pihak yang mempertimbangkan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Proses ini memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia dalam mengatur sektor pertambangan secara lebih berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyelesaian konflik ini juga menunjukkan pentingnya memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang relevan dalam proses penyelesaian sengketa dengan investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abib, Agus Saiful. (2018). Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Berbasis Pancasila. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 70–89.
- Agassi, Muhammad Adhe, Hendrawan, Rikki, & Mubarak, Arkan Aziz. (2023). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Ahmad Redi, S. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan*

Batubara. Sinar Grafika.

- Aminati, Arfiani Yulia, & Purwoko, Budi. (2013). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling resolusi konflik interpersonal. *Jurnal BK Unesa*, 3(01), 222–235.
- Amoako, Kwame Oduro, Lord, Beverley R., & Dixon, Keith. (2017). Sustainability reporting: Insights from the websites of five plants operated by Newmont Mining Corporation. *Meditari Accountancy Research*, 25(2), 186–215.
- Anshori, M. Syukron, Kriyantono, Rachmat, & Wulandari, Maulina Pia. (2017). Negotiation intermediaries dan identifikasi penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat adat cek bocek salesek reen sury di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 481–496.
- Djumati, Ninggimus Yolemal, Lengkong, Johny P., & Tulung, Trilke E. (2020). Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 8(4).
- Pemerintah, R. I. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 4.
- Raharja, Sunarya, & Harjiyatni, Fransisca Romana. (2014). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan (Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup). *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(2), 40764.
- Salim, H. S. (2022). Model Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1).
- Soetarto, Endriatmo. (2016). Contestations Access to Agrarian Resources in Forest Area of Dodo Jaran Pusang, Sumbawa District, NTB. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2).
- Usboko, Ignasius. (2016). Role Players Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 16–36.
- Widowaty, Yeni, & Fitriyanti, Fadia. (2014). Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 19.
- Winarta, Frans Hendra. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).